

Komunikasi Politik

(Studi Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019)

Rizky Abdul Malik

Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi
rizkyabdulmalik@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Komunikasi Politik dalam Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019”. Dilatar belakangi oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tanggungjawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Salah satu cara mewujudkannya melalui kegiatan komunikasi politik antara anggota DPRD dengan konstituen melalui reses. Teori yang digunakan untuk mengkajinya adalah konsep partai politik, komunikasi politik dan masa reses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan komunikasi politik. *Pertama*, anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya menjadikan reses sebagai agenda rutinitas formal. *Kedua*, proses komunikasi politik tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik. *Ketiga*, keterbatasan waktu pelaksanaan reses yang hanya tiga hari pelaksanaan. *Keempat*, komunikasi politik terkendala dengan adanya batasan wilayah politik dan tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Masa Reses, Anggota DPRD

Abstract

This Research entitled “Komunikasi Politik dalam Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019”. Background by legislators as elected representatives have a responsibility to promote the interests of the people. One way of doing that through the activities of political communication between legislators with constituents through the recess. The theory used to study it is the concept of political parties, political communication and recess times. The method used in this study is a qualitative research method using descriptive. The results showed that in carry out political communication. First, the PPP Faction of Legislative Members Tasikmalaya city to make the recess as a formal routine agenda. Second, political communication process does not accommodate the interests of the community well. Third, the implementation time constraints recess which is only three days of implementation. Fourth, Political communication is constrained by the limits of political territory and does not pay attention to public representation.

Keyword: Political Communication, Recess Period, Legislative Member.

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana komunikasi politik dalam kegiatan masa reses anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tanggungjawab untuk dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban diantaranya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Salah satu bentuk komunikasi antara anggota DPRD dengan rakyat (konstituen) adalah melalui reses. Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Alasan penulis memilih PPP dikarenakan dari tahun 2004, 2009 dan 2014 PPP selalu menjadi partai yang

memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kota Tasikmalaya.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Pelaksanaan reses di Kota Tasikmalaya dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. Masa reses hanya dilakukan tiga hari pelaksanaan.

“Dasar Pembangunan itu secara umum ada dua yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses. Musrenbang dilaksanakan oleh eksekutif mulai dari tingkat kelurahan sampai kota. Biasanya, aspirasi keinginan yang belum tersampaikan dalam musrenbang masyarakat menyampaikannya pada saat masa reses.” (Drs. Asep Hari Mulyana selaku Kepala Sub Bagian Persidangan Wawancara Pra Penelitian 28 November 2018).

Tahun 2018, anggota DPRD Kota Tasikmalaya telah melakukan dua kali masa reses yaitu pada Masa Reses I bulan April, Masa Reses II bulan Agustus dan Masa Reses III akan dilaksanakan pada bulan Desember. Selanjutnya, Masa Reses tersebut

menjadi fokus penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam masa reses berkaitan dengan proses menyerap dan menghimpun aspirasi. Bentuk komunikasi politik Anggota DPRD Fraksi PPP Periode 2014-2019 dalam melaksanakan reses bersifat beragam, dalam artian secara teknisnya dikembalikan kepada anggotanya. Biasanya dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi rakyat di dapilnya, ada yang mengundang langsung seluruhnya atau perwakilannya saja, ada yang diundang ke kediaman Anggota DPRD ataupun Anggota DPRD berkunjung kepada konstituennya selain itu ada yang memanfaatkan fasilitas umum dalam pelaksanaan seperti di Aula Kelurahan, Aula Kecamatan, Madrasah Diniyah, dan Aula Sekolah.

“Dalam melakukan masa reses mengenai waktu dan tempat diserahkan kepada anggotanya, biasanya mengunjungi langsung ke masyarakat. Dapil 1 terdiri dari 3 kecamatan sesuai dengan peraturannya masa reses yang difasilitasi 450 orang, maka 1 kecamatan mengundang 150 orang misalnya Kecamatan Bungursari dilaksanakan di Rumah Makan Hj. Ocoh seluruh perwakilan dari tiap Kelurahan diundang, yang hadirnya bisa lebih atau kurang. Selain sebagai bentuk proses penyerapan aspirasi biasanya melakukan pengawasan pembangunan yang terjadi di

Kecamatan tersebut. (H. Ramdani Munim, S.IP Anggota DPRD Dapil 1 yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP Dalam Wawancara Pra Penelitian dengan penulis 21 November 2018).

Pelaksanaan masa reses menjadi menarik untuk diteliti bagaimana anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan masa reses, mulai tahap perencanaan, proses dan tujuan komunikasi, apakah dalam realitasnya sesuai dengan teori yang ada atau hanya mementingkan kelompok tertentu saja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut perihal bagaimana Komunikasi Politik dalam Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori yaitu partai politik, komunikasi politik dan masa reses.

Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melakukan programnya (Budiardjo, 2008: 404). Sementara itu Budiardjo (2008: 405-409) menjelaskan fungsi partai politik sebagai berikut: Sebagai Sarana Komunikasi Politik, Sebagai Sarana Sosialisai Politik, Sebagai Sarana Rekrutmen Politik dan Sebagai Sarana Pengatur Konflik.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Surbakti, 2010: 152). Komunikasi politik juga diartikan sebagai proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok – kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. (Rush, Michael dan Phillip Althof. 2005: 24). Sementara itu, Karl W. Deutsch dalam (Rush, Michael dan Phillip Althof. 2005: 253) menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada satu sistem politik lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik

merupakan unsur yang dinamis dari suatu sistem yang dinamis.

Dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di dapilnya, Anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik sebagai berikut (Dan Nimmo, 2004: 168), *Pertama*, Bentuk komunikasi interpersonal Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. *Kedua*, Bentuk komunikasi organisasi Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak, t. Sementara itu Cangara dalam (Pureklolon, 2016: 8-9) menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.

Masa Reses

Bagi anggota dewan baik di tingkat pusat atau daerah reses atau masa reses bersifat strategis dan penting, karena dengan reses anggota dewan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Beberapa hal yang hendak diperoleh atau di capai oleh wakil rakyat dalam kunjungan reses, yaitu menyampaikan pekerjaannya, memantau pembangunan, melihat permasalahan di dapil, dan menjaring aspirasi konstituen. Masa reses merupakan kegiatan komunikasi dua arah antara

legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota dewan untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Masa reses dibagi dalam empat tahap meliputi Wasistiono, (dalam Abdulrahman): yaitu Persipan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak lanjut hasil reses.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor (dalam Moeleong 2016: 4). Tahapan dalam penelitian ini yaitu menetapkan informan, mengajukan pertanyaan, mewawancarai informan, melakukan analisis wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Teknis analisis data menggunakan model analisis Milles dan Huberman.

3. UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI POLITIK DALAM KEGIATAN MASA RESES

Unsur Pengaruh Lingkungan

Lingkungan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi (Cangara, 2016: 17). Unsur ini dapat digolongkan menjadi lingkungan fisik, sosial dan psikis. Dapil merupakan salah satu unsur pengaruh lingkungan. Kondisi demografis dan wilayah dapil termasuk dalam lingkungan fisik sementara kondisi sosial masyarakat, tingkat pekerjaan termasuk salah satu lingkungan sosial yang pada pembahasan kali ini menjadi subbagian yang tidak terpisahkan.

Lingkungan psikis menunjukkan kondisi situasi yang tepat untuk melakukan komunikasi mulai dari interkasi serta suasana ketika proses komunikasi itu terjadi. Lingkungan psikis ketika proses kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 DPRD Kota Tasikmalaya bervariasi.

Komunikator dan Komunikan

Harold Lasswell dalam (Pureklolon, 2016: 17) berpendapat bahwa komunikasi politik terkait dengan siapa, mengatakan apa, dimana, kepada siapa dengan efek apa yang terbentuk. Dalam kegiatan pelaksanaan reses

anggota DPRD Fraksi PPP menyampaikan pesan politik kepada masyarakat didapilnya dalam kegiatan reses yang nantinya akan membawa efek berupa aspirasi dan akan menjadi sebuah kebijakan.

Reses sebagai Media Komunikasi Politik

Reses ini merupakan salah satu proses pendekatan secara politis di dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Reses masuk kategori perencanaan pembangunan *bottom up*, dimana melibatkan keinginan masyarakat secara langsung yang disampaikan kepada anggota DPRD. Pada proses ini mengandung dua unsur. *Pertama*, unsur administratif sebagai kewajiban dari bagian pemerintah daerah. *Kedua*, lebih dominan unsur politis dalam artian merawat konstituen dimana keinginan masyarakat diakomodir oleh anggota DPRD dimana ia dapat suara maka hampir rata rata keinginan masyarakatnya terakomodir.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat pelaksanaan reses selain sebagai tanggung jawab atau kewajiban anggota DPRD secara konstitusional untuk menyerap dan menghimpun aspirasi guna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau rencana

pembangunan daerah tetapi sebagai kewajiban secara personal, bahkan bisa dikatakan sebagai kepentingan politis yaitu memperluas jaringan dan mencari dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya. Kepentingan-kepentingan tersebutlah yang keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana kinerja masing-masing anggota DPRD dalam melaksanakan penjangkaran aspirasi melalui reses.

Pesan Politik dalam Kegiatan Reses

Bentuk komunikasi yang dilakukan berupa dialog dan tatap muka yaitu ketika anggota DPRD datang untuk melaksanakan reses. Cara ini dibilang efektif untuk mengetahui langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan tatap muka dengan konstituennya anggota DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan. Selain sebagai sarana untuk menampung aspirasi reses kali ini diwarnai dengan kampanye politik karena hampir sebagian besar Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya mencalonkan kembali di Pemilu Tahun 2019.

Umpan Balik

Sesungguhnya reses merupakan pendekatan secara politis dalam artian

untuk merawat dan memperbanyak konstituennya. Bagi anggota DPRD melakukan komunikasi atau hubungan langsung dengan masyarakat dalam hal ini pada saat reses dapat membantunya memastikan keberlanjutan karir politiknya pada pemilu yang akan datang.

4. EFEKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK DALAM KEGIATAN MASA RESES

Analisis Perencanaan Komunikasi Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam menentukan waktu, lokasi dan peserta reses yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak selamanya memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan, tetapi sangat identik mendahulukan kelompok yang mendukungnya dan memberikan suara. Artinya penentuan kelompok sasaran bersifat politis yakni mendahulukan siapa yang mendukungnya dengan mengundang tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan komunikasi politik khususnya yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran, tidak sesuai dengan

teori dan tujuan utamanya. Atau tidak adanya persiapan terlebih dahulu dalam kegiatan reses.

Analisis Proses Komunikasi Politik

Berdasarkan hasil penelitian sesungguhnya proses pelaksanaan komunikasi politik dalam kegiatan reses menjadi tidak efektif, hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pelaksanaan unsur-unsur komunikasi politik. Ada beberapa alasan yang menyebabkan reses menjadi tidak efektif diantaranya: *Pertama*, Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya menjadikan reses sebagai agenda rutinitas formal. Seperti yang terjadi ketika penulis mengikuti Kegiatan Reses Masa Persidangan I bulan Desember di tiga anggota DPRD yang mewakili tiga dapil yaitu H. Ramdani Mun'im, S,IP, H. Enjang Bilawini, SH, SHI, dan H. Agus Wahyudin, SH., SHI. Dalam pelaksanaannya, ketiga anggota DPRD lebih banyak melakukan ceramah dan dialog satu arah dan konsolidasi untuk pemilihan selanjutnya. Selain itu, pada saat reses berlangsung ada satu calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang ikut silaturahmi di tiga kegiatan reses yang penulis ikuti.

“Pertama, Pada saat reses H. Ramdani Mun'im, S,IP, ia hanya menyampaikan pesannya sebentar, ia menjelaskan tentang reses dan lebih

banyak konsolidasi tiap kelurahan yang ada di kecamatan Bungursari untuk memilihnya kembali. *Kedua*, reses yang dilaksanakan H. Enjang Bilawini, SH., SHI, ia lebih banyak menjelaskan teknis reses, apa yang sudah dan akan ia lakukan untuk masyarakat di Kelurahan Cipawitra. *Ketiga*, reses yang dilaksanakan oleh H. Agus Wahyudin, SH., MH ia lebih banyak bercerita tentang program-program yang akan dijalankan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dari ketiga observasi yang penulis ikuti, kegiatan untuk dialog dengan masyarakat untuk penjangkaran aspirasi.” (Observasi Kegiatan Reses Masa Persidangan I 14, 16 dan 17 Desember 2018).

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan reses terbatas sebagai agenda rutinitas formal saja. Hal ini terlihat dari hubungan yang terjadi antara anggota DPRD dengan masyarakat hanya terkesan hubungan formal, padahal hal ini menentukan keberlangsungan proses komunikasi politik dalam kegiatan reses. Dalam proses komunikasi politik kegiatan reses anggota DPRD tidak menjalankan secara efektif, beberapa hal yang menunjukkan terkait dengan kredibilitas, daya tarik, kesamaan dan power sesungguhnya anggota DPRD dalam proses pelaksanaan komunikasi politik dipandang memiliki keahlian, atau orang yang mewakili masyarakatnya tetapi hal tersebut hanyalah sebuah formalitas saja, pesan yang disampaikan menjadi tidak efektif,

dalam pelaksanaannya lebih banyak melakukan ceramah umum misalnya tentang tugas pokok dan fungsi daripada melakukan penjangkaran aspirasi atau dialog.

Analisis Tujuan Komunikasi Politik

Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya sebagai perwakilan masyarakat mempunyai fungsi komunikasi politik yaitu sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Fungsi komunikasi politik mempunyai arti penting dalam sebuah sistem politik fungsi ini terkait dengan penyerapan aspirasi yang berasal dari masyarakat, yang nantinya dilakukakan agregasi dan artikulasi kepentingan untuk menghasilkan dasar yang akan menjadi sebuah kebijakan.

Fungsi ini belum bisa berjalan secara optimal seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, kurangnya persiapan sebelum kegiatan reses menyebabkan aspirasi yang bertujuan sebagai *input* pembangunan daerah menjadi kurang optimal. Faktor ini merupakan faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan tujuan komunikasi politik menjadi tidak efektif, hal ini disebabkan oleh:

Pertama, keterbatasan waktu pelaksanaan reses yang hanya tiga hari

pelaksanaan. Proses pelaksanaan komunikasi politik dalam kegiatan reses sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang diwakili.

“Kalau keinginan saya semua masyarakat terkunjungi dan terakomodir, tetapi berbicara fakta reses dilaksanakan 1 Tahun 3 kali, dalam 1 kali 3 pertemuan secara formal, jadi setahun itu ada 9 titik yang harus dikunjungi. Secara normatifnya reses dilaksanakan dalam satu periode tidak dapat semuanya terkunjungi. Saya ada 150 RW dengan asumsi reses berbicara ada ditataran 9 titik dalam 1 tahun, kan yang masyarakat inginkan itu kita mengunjungi masyarakat, bukan mengadakan pertemuan dimana masyarakat hadir ke tempat tersebut, yang lebih efektif kita datang ke masyarakat, masyarakat hadir melakukan pertemuan tetapi kalau memakai mekanisme seperti itu tidak akan cukup, dari daerah yang ada di dapil 2 juga 150 RW satu periode hanya 40 titik. (Riko Oktora, S.Kom Anggota DPRD Dapil II 22 November 2018).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reses yang terbatas mengakibatkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD tidak berjalan dengan baik. Fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan belum terpenuhi, karena pada tataran praktiknya anggota DPRD lebih sering mengumpulkan masyarakat disuatu tempat tertentu, tidak datang ke masyarakat setempat. Jadi yang menghadiri reses sebenarnya itu-itu saja.

Hasil pelaksanaan reses terdapat beberapa kendala, seperti tidak tercapainya tujuan reses, dalam artian ketika proses komunikasi politik berjalan, umpan balik atau tanggapan dari masyarakat mengalami hambatan. Ketika masyarakat ingin menyampaikan tanggapannya, anggota DPRD kurang merespon dengan baik, ia mengalihkan untuk menghubungi koordinator/timnya untuk berkomunikasi perihal permasalahan teknis. Maka, komunikasi politik yang terjadi hanya bersifat satu arah.

Kedua, komunikasi politik terkendala dengan adanya batasan wilayah politik dan tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muslim Sumarna, M.Si (11 Januari 2019) mengemukakan bahwa:

“Ada beberapa hambatan yang terjadi di lapangan ketika reses, salah satunya pengaruh lingkungan dan perbedaan pilihan misalnya tokoh masyarakat, RW dan RT tidak sama dengan saya, dalam arti mendukung partai lain maka saya tidak akan melakukan reses dan memperjuangkan aspirasinya”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan komunikasi politik sesungguhnya terjebak pada agenda

rutinitas formal dan manfaatnya kurang terasa karena tidak terlaksananya fungsi representasi, kegiatan ini hanya bermanfaat untuk orang-orang yang mendukungnya saja dan tidak merepresentasikan wilayah tersebut. Masyarakat yang hadir meskipun itu dari wilayah politik seharusnya menjadi perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang ada. Tetapi realitas dilapangan ditemukan bahwa masyarakat yang hadir tidak mencerminkan perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Yang menghadiri hanya orang terdekatnya atau bisa dikatakan kader sehingga aspirasi dari masyarakat biasa sangat terbatas dan sulit untuk diwujudkan.

Ditinjau dari representasi politik, anggota DPRD melakukan komunikasi politik mewakili masyarakat yang ada didapilnya serta memperhatikan suara partai. Tak dapat dipungkiri partai politik merupakan kendaraan mereka menuju anggota DPRD maka pelaksanaan fungsi representasi ini lebih banyak sebagai perwakilan partai politik dan sebagai balas jasa kepada masyarakat yang telah mendukung pada saat pileg.

Secara normatif representasi politik atau hubungan anggota DPRD dengan masyarakat melibatkan komunikasi dengan masyarakat terkait

dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Hubungan dengan masyarakat menjadi penting karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, anggota DPRD, Partai Politik dan masyarakat itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan fungsi representasi politik mewakili aspek politik yang berkaitan dengan masyarakat sebagai perwakilannya. Relasi yang terjadi hanya bersifat formal. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya sebagai orang yang memiliki otoritas untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam melakukan fungsinya ia menentukan sendiri, hal ini berdasarkan banyaknya perbedaan aspirasi dari masyarakat. Dalam hal mengambil atau menentukan wilayah sangat tergantung pada dimana ia memperoleh suara.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan komunikasi politik dalam kegiatan reses berjalan tidak efektif disebabkan karena:

Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya menjadikan reses sebagai agenda rutinitas formal. Hal ini

terlihat dari hubungan yang terjadi antara anggota DPRD dengan masyarakat terkesan hubungan formal. Jadwal yang diberikan kepada masyarakat terkesan mendadak sehingga menyebabkan kurangnya persiapan dari masyarakat pada akhirnya masyarakat tidak mengerti substansi dari reses. Masyarakat yang hadir terkesan dimobilisasi dalam artian ia yang paling dekat dengan tokoh masyarakat atau tim suksesnya.

Proses komunikasi politik tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD sebagai orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan menyampaikan pesan hanya sebatas formal dan bersifat umum. Pesan yang disampaikan lebih dominan mengenai tugas pokok dan fungsi, rencana kerja pemerintah, dan kepentingan pribadinya untuk konsolidasi dalam melanjutkan di periode selanjutnya.

Keterbatasan waktu pelaksanaan reses yang hanya tiga hari pelaksanaan. Proses pelaksanaan komunikasi politik dalam kegiatan reses sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang diwakili. Pelaksanaan reses yang terbatas mengakibatkan penyerapan aspirasi masyarakat oleh

anggota DPRD tidak berjalan dengan baik.

Komunikasi politik terkendala dengan adanya batasan wilayah politik dan tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat. Dalam melaksanakan komunikasi politik sesungguhnya terjebak pada agenda rutinitas formal dan manfaatnya kurang terasa karena tidak terlaksananya fungsi representasi, kegiatan ini hanya bermanfaat untuk orang-orang yang mendukungnya saja dan tidak merepresentasikan wilayah tersebut

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menguraikannya melalui beberapa saran. Dengan harapan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat khususnya mengenai komunikasi politik dalam kegiatan masa reses.

Penguatan kapasitas anggota DPRD dengan cara mengembangkan model komunikasi politik yang efektif. Reses yang selama ini dilaksanakan terkesan tidak efektif karena lebih banyak melakukan ceramah, mementingkan kelompoknya sehingga menyebabkan komunikasi politik yang terjadi bersifat satu arah. Dalam

melaksanakan komunikasi politik di kegiatan reses, anggota DPRD harus melakukan perencanaan komunikasi politik terstruktur dengan baik. Perencanaan ini bertujuan untuk memanfaatkan waktu reses yang hanya tiga hari pelaksanaan, perencanaan dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi masyarakat dan tempat yang akan dikunjungi. Jadi, nantinya masyarakat yang hadir diharapkan mampu mewakili seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat. Hal lain yang perlu dilakukan adalah Sekretariat DPRD perlu membuat jadwal reses yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi, dalam satu tahun pelaksanaan masa reses, masyarakat yang dikunjungi tidak berfokus pada kelompok politiknya melainkan dilakukan secara merata. Sehingga efektivitas dalam pelaksanaan reses akan dirasakan masyarakat.

Saran untuk penelitian lanjutan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Komunikasi Politik dalam Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya bersifat rutinitas formal saja dan mendahulukan

kepentingan kelompoknya. Selain itu, tidak jelasnya tindak lanjut dari komunikasi politik dalam kegiatan reses menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya reses menjadi tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut, ada hal penting untuk menjadi rencana penelitian lanjutan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. Yaitu bagaimana tindak lanjut dan analisis hasil dari proses pelaksanaan komunikasi politik dalam kegiatan reses. Hal itu akan menunjukkan bahwa apakah komunikasi politik merupakan cara yang efektif untuk melihat hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat.

Selain itu, penjelasan mengenai representasi politik menarik untuk dikaji dan dianalisis untuk penelitian lanjutan. Konsep representasi politik merupakan konsep yang penting untuk melihat bagaimana relasi atau hubungan anggota DPRD dengan konstituen. Apa dan bagaimana seharusnya representasi politik itu dilaksanakan. Selain itu, model perwakilan yang dilakukan anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya apakah termasuk perwakilan formal, deskriptif, simbolik, dan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Cangara, Hafied. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cangara, Hafied. (2016). *Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan Strategi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan. (2016). *Hasil Muktamar VIII PPP*. Jakarta: DPP PPP.
- Efriza, (2014). *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: SETARA Press.
- Efriza dan Yoyoh Rohaniah. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Faisal, Sanapiah. (2007). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komisi Pemilihan Umum. (2011). *Modul 1 Pemilih Pemula*. Jakarta: KPU.
- Lunandi. (1987). *Komunikasi Mengena*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhtadi, Asep Saeful. (2008). *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. (2004). *Komunikasi Politik (Komunikator, pesan dan media)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhasim, Moch. (2016). *Masa Depan Partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pureklolon, Thomas Tokan. (2016). *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rush, Michael dan Phillip Althof. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. (2004). *Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Soehardjo, Rudy. (2004). *Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/Kota*. Semarang: CV Aneka Ilmu.

Sumber Karya Tulis Ilmiah

Hamida, Rozidateno Putri. (2014). *Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pilihannya (Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode 2004-2009)*. Laporan Penelitian di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Hidatuloh dan Ulung Pribadi. (2016). *Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Volume 3 No 2. Halaman 340-365.

Maharani, Dian. (2017). *Pelaksanaan Reses Oleh Anggota DPRD Kota Batam Periode (2014-2019) Tahun 2015 (Studi Dapil 1 Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/Kep.10/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Sumber Internet

Abdulrahman, Wahid. (2014). *Desain Ulang Reses DPRD*. (Online). Tersedia: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/11830> (14 September 2018).

Amin, Muryanto. (2013). *Pemetaan Daerah Pemilihan* (Online).

Tersedia:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46758/Pemetaan%20Daerah%20Pemilihan.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (12 Januari 2019).

Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. (2018). *Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018*. (Online). Tersedia:

<https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication.html> . (12 Januari 2019).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. (2014). *Profil Fraksi*. (Online). Tersedia: <http://dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/profil-per-fraksi> (13 September 2018).

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya. (TT). *Data Hasil Pemilu*. (Online). Tersedia: [\[tasikmalaya.kpu.go.id/portfolio-category/hasil-pemilu/\]\(http://tasikmalaya.kpu.go.id/portfolio-category/hasil-pemilu/\). \(13 September 2018\).](http://kota-</p></div><div data-bbox=)

Palulungan, Lusiana dkk (2018). *Panduan Reses Partisipatif*. (Online). Tersedia: [http://pintarmampu.bakti.or.id/sites/default/files/dokumen/PANDUAN RESES PARTISIPATIF \(HASIL UJI COBA YLP2EM\).docx](http://pintarmampu.bakti.or.id/sites/default/files/dokumen/PANDUAN RESES PARTISIPATIF (HASIL UJI COBA YLP2EM).docx). (14 September 2018).

Sumber Lainnya

Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 DPRD Kota Tasikmalaya.

Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 DPRD Kota Tasikmalaya.

Rekapitulasi Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. Profil DPRD Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019.